



PAJAK DAERAH

Ribuan WP Ajukan Keringanan Pembayaran

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2025. Meski demikian, ada ribuan wajib pajak (WP) yang mengajukan keringanan pembayaran.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Muhammad Rohmad, menuturkan ada sekitar 2.000 WP yang meminta keringanan pembayaran PBB-P2.

Wajib pajak yang memohon keringanan rata-rata wajib pajak pribadi. "Alasannya karena rata-rata mereka telah memenuhi ketentuan pengajuan keringanan pajak, antara lain veteran, pensiunan, dan karena kondisi ekonomi menurun," katanya, Jumat (29/8).

Selain perorangan, ada beberapa hotel yang mengajukan keringanan PBB-P2. Meski begitu, dia mengaku jumlahnya tidak signifikan. "Perhotelan yang mengajukan keringanan pembayaran PBB-P2 tidak banyak, hotel ada cara khusus untuk mengajukan keringanan pembayaran PBB-P2," katanya.

Dia mengaku persentase jumlah wajib pajak yang mengajukan keringanan pembayaran PBB-P2 tersebut masih minim ketika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang harus membayar PBB-P2 di Kota Jogja yang mencapai sekitar 97.000 wajib pajak.

Hingga saat ini, realisasi capaian PBB-P2 di Kota Jogja telah mencapai lebih dari 50% dari target tahun 2025 yang mencapai Rp118 miliar. Dia optimistis target PBB-P2 tersebut akan tercapai.

"Kami memprediksi akhir September [2025], realisasi pembayaran PBB-P2 sudah lebih dari 90 persen," katanya. Selama ini, sebagian WP membayar PBB-P2 menjelang batas waktu pembayaran pada September 2025. (Setiani Yuliantari)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005